

ISSN: 2302-3058

---

# BioKultur

Volume III Nomor 2, Juli-Desember 2014

---

**Perempuan dan Otonomi Ekonomi: Analisa Sosok Perempuan Pesisir  
dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan  
Sampang Kabupaten Madura**

Roikan

**Inkonsistensi Keputusan Terhadap Regula Adat**

F.X. Wigbertus Labi Halan

**Kekerasan Simbolik Pada Siswa Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional**

Sri Widarni

**Metal Satu Jari**

**(Studi Deskriptif Mengenai Metal Satu Jari sebagai *Counterculture* terhadap  
*Metalhead Mainstream* di Jakarta)**

Dyan Safitri

**Ukuran-ukuran Antropometris di Usia 18-21 tahun pada**

**Deuteromalayid dan Mongolid**

Myrtati Dyah Artaria dan Herin Setianingsih

**Pemanasan Global, Perubahan Iklim, Dampak, dan Solusinya  
di Sektor Pertanian**

Mohammad Adib

---

## Table of Contents

No.	Title	Page
1	Perempuan dan Otonomi Ekonomi: Analisa Sosok Perempuan Pesisir dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Sampang Kabupaten Madura	324 - 342
2	<b>Inkonsistensi Keputusan Terhadap Regula Adat</b>	343 - 355
3	Kekerasan Simbolik Pada Siswa Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional	356 - 375
4	Metal Satu Jari (Studi Deskriptif Mengenai Metal Satu Jari sebagai Counterculture terhadap Metalhead Mainstream di Jakarta)	376 - 395
5	Ukuran-ukuran Antropometris di Usia 18-21 tahun pada Deuteromalayid dan Mongolid	396 - 419
6	Pemanasan Global, Perubahan Iklim, Dampak, dan Solusinya di Sektor Pertanian	420 - 429

Inkonsistensi Keputusan Terhadap Regula Adat

**Author :**

F.X. Wigbertus Labi Halan | bill.halan@gmail.com  
Mahasiswa Program Magister Sosiologi Fisip-Universitas Airlangga Surabaya

**Abstract**

This article focuses on the process of making a decision to exert material-based forms (trunk, money, and land) in Waibalun subdistrict, Flores Timur related to Welin. In this regard, Welin (maternal value) is used as a member of tribes dead. Accordingly customary rules do not generate a material consequence in return. Current customary rules that lead to challenge i.e., material form, is at odds with indigenous law. In response to this problem, this thesis exerts the logic of symbolic interactionism. Additionally, a qualitative method is being used in this thesis, particularly sympathetic introspection as explained by Blumer. Moreover, an observation, an interview and a reading-based method are three key technical tools both in exploring and elaborating information. In addition, this thesis exerts a purposive sampling in designating an informant. Furthermore, the outcome of this research highlights that figure whom makes a decision (belake) use the conversation regarding Welin is merely as a stage to pursue his personal interests. This indicates that value that controls social situation has no remarkable power to control the current social situation including belake's decision. This imparts unique feature socially in Waibalun, explaining that a society is at the cultural entropy.

Keyword : inconsintency, meaning, status, Wein, culturana, entropy, ,

**Daftar Pustaka :**

1. **Denzin, Norman K, (2003).** Symbolic Interactionism And Cultural Studies: The Politics of Interpretation. USA : Black Well Publisihing
2. **Kleden, Paulus Budi, (2006).** Membongkar Derita: Teodice: Sebuah Kegelisahan Filsafat dan Teologi. Maumere : Ledalero
3. **Ritzer, George, (2011).** Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpardigma Ganda. Jakarta : Rajawali Pers

## Inkonsistensi Keputusan Terhadap Regula Adat

F.X. Wigbertus Labi Halan

[bill.halan@gmail.com](mailto:bill.halan@gmail.com)

Mahasiswa Program Magister Sosiologi Fisip-Universitas Airlangga Surabaya

---

### **Abstract**

*This article focuses on the process of making a decision to exert material-based forms (trunk, money, and land) in Waibalun subdistrict, Flores Timur related to Welin. In this regard, Welin (maternal value) is used as a member of tribes dead. Accordingly customary rules do not generate a material consequence in return. Current customary rules that lead to challenge i.e., material form, is at odds with indigenous law. In response to this problem, this thesis exerts the logic of symbolic interactionism. Additionally, a qualitative method is being used in this thesis, particularly sympathetic introspection as explained by Blumer. Moreover, an observation, an interview and a reading-based method are three key technical tools both in exploring and elaborating information. In addition, this thesis exerts a purposive sampling in designating an informant. Furthermore, the outcome of this research highlights that figure whom makes a decision (belake) use the conversation regarding Welin is merely as a stage to pursue his personal interests. This indicates that value that controls social situation has no remarkable power to control the current social situation including belake's decision. This imparts unique feature socially in Waibalun, explaining that a society is at the cultural entropy*

**Keywords:** inconsistency; meaning; status; Welin; cultural entropy.

### **Abstrak**

Artikel ini berfokus pada proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan barang-barang materiil (seperti gading, uang, atau tanah) terkait dengan Welin di Kelurahan Waibalun, Flores Timur. Dalam hal ini, Welin (nilai keibuan) digunakan ketika ada anggota suku yang meninggal. Oleh karenanya peraturan adat tidak menghasilkan konsekuensi materiil. Peraturan adat saat ini yang menantang hal tersebut (mengenai penggunaan barang-barang materiil) berlawanan dengan hukum yang asli. Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini memanfaatkan logika interaksionisme simbolik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, secara spesifik metode introspeksi simpatetik seperti yang dijelaskan oleh Blumer. Lebih lanjut, observasi, wawancara, dan metode berbasis bacaan merupakan tiga alat utama yang digunakan dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi informasi. Untuk menentukan informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyoroti bahwa figur yang mengambil keputusan (*belake*) memanfaatkan pembicaraan mengenai Welin semata-mata sebagai jalan untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai yang mengendalikan situasi sosial tidak memiliki kekuatan yang cukup berarti dalam situasi sosial saat ini, termasuk mengenai pengambilan keputusan oleh *belake*. Hal ini menunjukkan bahwa Waibalun memiliki corak sosial yang unik, yang menjelaskan bahwa sebuah masyarakat sedang berada dalam entropi kebudayaan

**Kata kunci:** Inkonsistensi, makna, status, Welin, entropi kebudayaan

---

**K**ajian dalam penelitian ini membahas perihal inkonsistensi keputusan terhadap regula adat. Regula adat yang dimaksud berkenaan dengan konteks pembicaraan tentang *welin* di Kelurahan Waibalun.<sup>1</sup>

*Welin* dipahami sebagai nilai yang melekat dalam diri seorang ibu karena kualitas ibu yang memberi turunan (prokreasi) dan aktusnya melayani (gelekat) suku, dan ketika ada anggota suku di Waibalun yang meninggal, *welin* seorang ibu dibicarakan. Pembicaraan tentang *welin* dilakukan dalam forum adat.

Pembicaraan tentang *welin* di Waibalun bersifat imateriil, artinya tidak melahirkan keputusan berupa penggunaan barang materiil seperti gading, uang, atau pun tanah (Tukan Bernard & Tukan Johan S. 1995). Pada tataran wacana masing-masing anggota suku yang terlibat dalam forum adat akan membahas *welin* ibu yang meninggal dengan menggunakan mekanisme yang biasa digunakan dalam konteks masyarakat Waibalun. Dalam hal ini tidak akan ada tuntutan atau keputusan yang melegitimasi penggunaan barang materiil ini. Dalam perjalanan waktu, pembahasan tentang *welin* di forum adat telah melahirkan keputusan berkenaan dengan penggunaan barang materiil, seperti gading, uang atau tanah. Keputusan ini mengindikasikan beberapa hal berikut, yakni ada keputusan yang dibuat

dalam satu forum adat, ada praktik yang melangkahi regula adat, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum itu, dan ada kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut, mengapa masyarakat Waibalun menggunakan barang materiil (gading, uang, tanah) ketika membicarakan *welin*? Pihak mana saja dan dalam bentuk apa sajamerka yang merasa diuntungkan atau sebaliknya merasa dirugikan berhadapan dengan keputusan ini? Untuk menjawab persolan ini digunakan kerangka berpikir interaksionisme simbolik, khususnya gagasan Herbert Blumer dan Herbert Mead.

### **Teoretik**

Inkonsistensi berkaitan dengan keputusan, dan keputusan erat kaitannya dengan pilihan sikap, dan pilihan sikap berkaitan erat dengan pemaknaan terhadap status atau peran. Untuk itu kerangka teoretik yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik, dalam hal ini teori Blumer dan Mead. Blumer sebagaimana yang dikutip Denzin menegaskan bahwa hal terpenting dalam analisis bukanlah tendensi dari sebuah tindakan tetapi proses yang kemudian menghasilkan tindakan tersebut (Denzin, 2003).

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan dapat diuraikan bahwa terdapat tiga tahap besar dalam kaitan dengan pembicaraan tentang *welin*, yakni tahap persiapan, tahap pertemuan, dan tahap pelaksanaan keputusan dalam forum adat.

Dalam tiga tahap ini beberapa gagasan Mead dan Blumer digunakan untuk menjelaskan pemaknaan masing-masing pihak

---

<sup>1</sup>Dari sisi geografis, Waibalun terletak di daratan Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara kultural masyarakat Waibalun masuk dalam etnik Lamaholot.

yang terlibat dalam pembicaraan tentang *welin*.

Mead menjelaskan bahwa dalam suatu komunikasi terjadi proses pengambilan peran (*role taking*) dan penyesuaian (*generalized others*) (Ritzer, 2011). Dua hal ini yang memungkinkan komunikasi dapat berjalan baik. Gagasan Mead digunakan untuk menelusuri bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembicaraan tentang *welin* menempatkan diri dan menjelaskan perannya masing-masing dalam proses komunikasi.

Mead dalam penekanannya tentang interaksi antarindividu, menegaskan juga bahwa di antara setiap reaksi ada proses interpretasi. Sehingga dalam berkomunikasi, individu tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus mana yang akan ditanggapi (Da silva, 2007) Gagasan Mead ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi antarpihak-pihak yang terlibat. Pola komunikasi kemudian dengan tepat akan menjelaskan pola interaksi pihak-pihak yang terlibat

Herbert Blumer menjelaskan hal yang mirip dengan gagasan Mead berkaitan dengan pola interpretasi. Menurut Blumer, dalam berinteraksi, piranti penting yang digunakan adalah bahasa (Denzin, 1987). Melalui bahasa terungkap pesan simbolik yang turut menegaskan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat, status para tokoh yang terlibat, serta memperjelas pola pemaknaan tentang momentum *welin*. Hal ini terungkap dalam sapaan, pola tutur kata, dominasi pembicaraan, juga dalam argumentasi-argumentasi yang dibangun.

Blumer menggunakan istilah identifikasi-diri (*self-identification*) (Blumer 1969:83): unit yang bertindak (*acting unit*) adalah diri (*the self*); diri bertindak (*the self-*

*acts*) di dalam dan dalam kaitannya dengan situasi yang bersangkutan; dan tindakan dibentuk atau dikonstruksi dengan cara menginterpretasikan situasi itu (Blumer 1969:85). Menurut Blumer, interpretasi terdiri atas tiga langkah: *pertama*, diri yang bertindak harus mengidentifikasi hal-hal yang akan ditangani oleh tindakan itu, seperti tugas-tugas, peluang-peluang, hambatan-hambatan, distraksi-distraksi, dan sumber daya. *Kedua*, diri yang bertindak harus menilai hal-hal itu dengan cara tertentu. *Ketiga*, diri yang bertindak harus mengambil keputusan-keputusan berdasarakan penilaian-penilaian tersebut (Blumer 1969:85) (Turner: 2012). Gagasan Blumer ini sangat penting digunakan untuk mendalami keputusan-keputusan anggota suku yang terlibat dalam pembicaraan tentang *welin*. Sebab, keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, keputusan selalu memiliki konsekuensi, keputusan menjelaskan batas wewenang dan batas kepentingan. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan antarsuku ini yang kemudian akan dianalisis.

Blumer menguraikan tiga asumsi berkaitan dengan makna. Menurut Blumer, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung (Blumer:1996;2) (Soeprapto: 121). Makna itu berkenaan dengan status, juga konteks (*welin*). Menurut Blumer makna ini merupakan suatu produk sosial.

## Metode Penelitian

Dengan menggunakan kerangka berpikir Blumer dan Mead, metode yang tepat untuk melakukan penelitian ini adalah metode yang ditawarkan Blumer, *introspeksi sympatetic*. Dengan menggunakan metode ini, peneliti diajak untuk 'turun' dan terlibat dalam konteks masyarakat tempat dilakukan penelitian. Dengan kata lain peneliti seharusnya *come to nature* dan ber-Ada bersama dalam komunitas budaya masyarakat Waibalun. Dan teknik pengumpulan data yang mendukung metode ini adalah metode wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi partisipatif. Berkenaan dengan teknik pengumpulan data, sejak awal peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap kapabel menjawab persoalan penelitian (*purposive sampling*).

## Memahami relasi sistem perkawinan likat telo, Status Opu dan Belake, Welin, Dan Keputusan

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2014 di Kelurahan Waibalun dapat diuraikan bahwa pembicaraan tentang *welin* melibatkan dua tokoh kunci, yakni *opu* dan *belake*. *Opu* adalah istilah yang dikenakan bagi anggota suku yang menerima' perempuan dari suku *belake* (Kohl, 2009). Dikatakan 'menerima' karena salah satu anggota dari suku *opu* menikah dengan perempuan dari suku *belake*. Sedangkan *belake* adalah anggota suku yang dianggap 'memberi' perempuan kepada pihak *opu*. Memberi dalam hal ini dimengerti dalam konteks perkawinan, yang mana anggota-anggota suku dari

pihak *belake* merestui perkawinan yang terjadi.

Membahas relasi antara *opu* dan *belake* dalam urusan pembahasan tentang *welin*, selalu harus diawali dengan pemahaman yang holistik tentang sistem perkawinan yang berlaku. Secara umum sistem perkawinan yang berlaku di Waibalun adalah sistem perkawinan *likat telo*. Sistem perkawinan *likat telo* bisa diterjemahkan sebagai sistem perkawinan tiga tungku. Secara umum sistem perkawinan ini sudah mengatur pola relasi antara suku-suku yang ada di Waibalun. Artinya, masing-masing anggota suku di Waibalun sudah diatur dengan anggota suku mana ia harus menikah. Di Waibalun terdapat 17 suku tersisa<sup>2</sup> yang diakui sebagai bagian dari suku di Waibalun. Ketujuh belas suku di Waibalun saat ini adalah: (1) Suku Balun, (2) Suku Koten, (3) Suku Kedang, (4) Suku Marang, (5) Suku Betan, (6) Suku Tukan Weru'in, (7) Suku Tukan Amadoren, (8) Suku Tukan ama lau, (9) Suku Kromen, (10) Suku Weking, (11) Suku Kleden, (12) Suku Hadjon, (13) Suku Kolin, (14) Suku Letor, (15) Suku Kerans, (16) Suku Kean, (17) Suku Tobin.

Dengan mengikuti pengaturan dalam sistem perkawinan yang ada, masing-masing suku akan terhubung dalam relasi dengan anggota-anggota suku lain sebagai *belake* atau sebagai *opu*. Masing-masing suku sebut saja suku A, pria dari suku ini menikah dengan wanita dari suku B. Dan Pria dari suku B menikah dengan wanita

---

<sup>2</sup> Dikatakan tersisa karena ada anggota-anggota suku yang sudah hilang karena anggota suku tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris suku

dari suku C. Dan pria dari suku C akan menikah dengan wanita dari suku A. Dalam relasi antara *opu* dan *belake*, pria dari suku A menganggap pria dari suku B sebagai *belake*. Sebaliknya pria dari suku B menanggapi pria dari suku A sebagai *opu*. Demikian pun berlaku untuk relasi antara suku B dan C. Berikut akan diuraikan relasi perkawinan dari suku Kedang sebagai contoh.

Relasi perkawinan suku Kedang dapat dijelaskan demikian, pria dari suku Kedang hanya boleh menikah (*Mure'wanan*) ( → ) dengan wanita dari suku Kleden, suku Hadjon, suku Tukan Amadoren, suku Kromen, suku Tukan Weru'in, dan suku Weking. Para pria dari

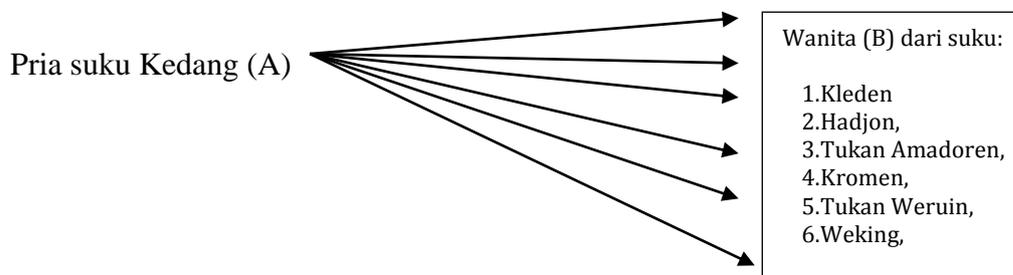
suku Kedang menganggap para pria dari suku-suku ini sebagai *belake* sebab mereka yang memberi istri kepada suku Kedang. Para pria dari suku Kedang tidak boleh menikah dengan wanita dari suku Tukan Amalau, suku Weking, suku Kerans, suku Tobin, suku Kean, suku Letor, karena suku-suku ini justru yang menjadi *opu'* dari suku Kedang. Selain itu pria dari suku Kedang

tidak boleh menikah dengan wanita dari suku Koten, suku Balun, suku Betan, dan suku Marang karena suku-suku ini adalah suku *kele'kematek* dari suku Kedang, artinya suku yang dianggap sebagai saudara dari suku Kedang. Lihat gambar berikut:

Suku	<i>Mure'wanan</i> ( <i>Belake</i> )	<i>Opu'</i>	<i>Kele'kematek</i>
Kedang	Kleden, Hadjon, Tukan Amadoren, Kromen, Tukan Weruin, Weking	Tukan Amalau, Kerans Kerans, Tobin, Kean, Letor	Koten, Balun, Betan, Marang

Untuk memahami lebih rinci relasi perkawinan suku kedang di Waibalun, dalam relasi tiga tungku, hal pertama yang perlu di-

perhatikan adalah pola perkawinan suku Kedang yang kita sebut (A) dan wanita dari suku yang dinikahi (B).

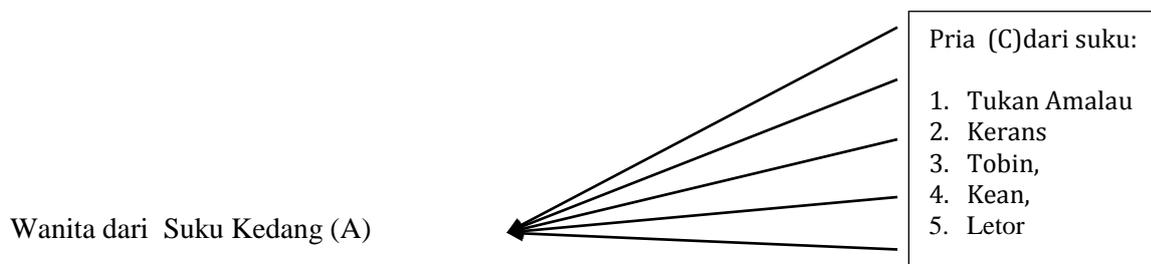


Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pria dari suku-suku (C) yang berhak menikah dengan perempuan dari suku

Kedang (A). Berdasarkan konsensus di masyarakat bisa dideretkan suku-suku yang menjadi *opu'* dari suku Kedang, yakni, pria

dari Tukan Amalau, Kerans, Tobin, Kean, kedang (A).  
 Letor yang menikah dengan wanita dari suku

Gambar Perkawinan Suku Kedang (wanita) (A) yang dinikahi pria dari suku lain (C)



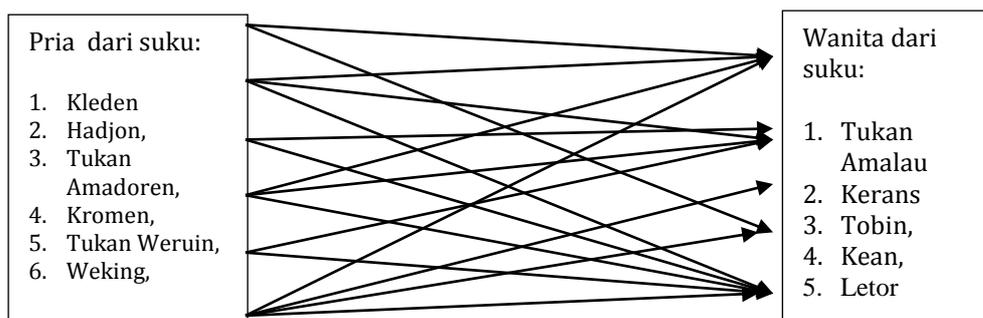
Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana relasi antara pria (dari suku yang memberi istri kepada suku Kedang) (*belake*) (B) dengan wanita-wanita (dari suku yang menerima perempuan suku Kedang) (C). Dalam hal ini bagaimana hubungan antara pria-pria dari suku Kleden, Hadjon, Tukan Amadoren, Kromen, Tukan Weruin, Weking; dengan wanita dari suku Tukan amalau, Kerans, Kean, Tobin, Letor. Hubungan antara B dan C

1. Wanita dari suku Tukan Amalau dinikahi ( ← ) pria dari suku: Kromen, Balun, Kleden, Kolin, Weking, Hadjon

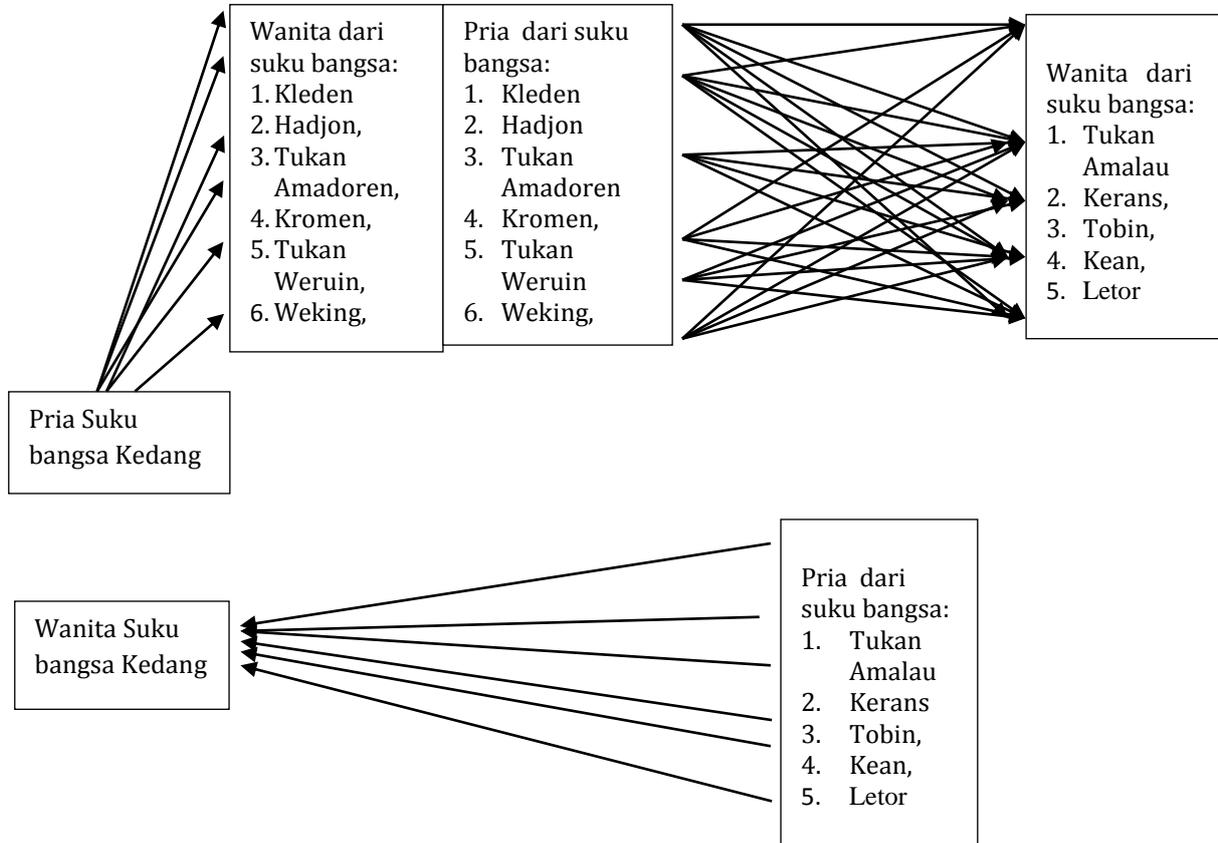
2. Wanita dari suku Kerans dinikahi ( ← ) pria dari suku Tukan Amadoren, Weking, Tukan Weruin, Kromen, Balun, Hadjon, Kleden
3. Wanita dari suku Tobin dinikahi ( ← ) pria dari suku: Tukan Weruin, Tukan Amadoren, Kleden, Hadjon, Kromen, Weking
4. Wanita dari suku Kean dinikahi ( ← ) Pria dari suku: Tukan Amadoren, Tukan Weruin, Kleden, Hadjon, Weking

Wanita dari suku Letor dinikahi ( ← ) wanita dari suku: Tukan Amadoren, Tukan Weruin, Kromen, Kleden, Hadjon, Weking.

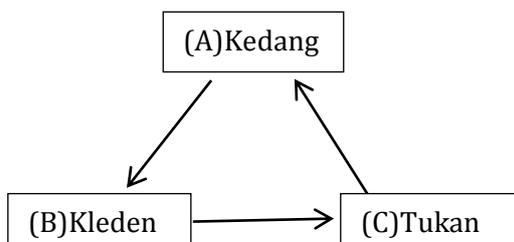
Gambar relasi Perkawinan Suku B



Gambar relasi lengkap Suku A, B, C, khusus untuk perkawinan suku Kedang dapat digambarkan demikian:



Berdasarkan gambar di atas jika terjadi pernikahan antara pria dari suku Kedang dengan wanita dari suku Kleden salah satu pasangan yang memungkinkan terbentuknya sistem *likat telo* adalah suku Tukan Amalau. Berikut gambar relasi Suku Kedang (A), Suku Tukan Amalau (B) dan Suku Kleden (C).



Berdasarkan penggambaran sistem relasi, masyarakat secara langsung telah menyiapkan kemungkinan-kemungkinan untuk terbentuknya perkawinan dengan sistem *likat telo*. Pada saat pembicaraan perkawinan polanya suku A menikahi (→) B dan B menikahi (→) C dan C menikahi (→) A.

Pada saat pembicaraan tentang welin, *opu* pergi ke rumah *belake* untuk membahas welin ibu dari suku *belake*. Melihat dan menilai tahapan dalam pembahasan tentang welin dapat dinyatakan bahwa dalam setiap tahap pembicaraan tentang welin terungkap pola relasi antara *opu* dan *belake*. Dengan menggunakan gagasan Mead dan Blumer

bisa dipetakan pola relasi antara *opu* dan *belake* berikut ini:

1. Masyarakat Waibalun memaknai *belake* sebagai pemilik (yang sifatnya permanen) terhadap ibu yang telah dinikahi pihak *opu*. Ketika ada peristiwa kematian, pihak *belake* menuntut *opu* agar melunasi *welin* ibu yang telah dinikahi pihak *opu*. Istilah 'melunasi' dipahami dalam tataran wacana, artinya pihak *opu* mesti mencari dan menyebut salah seorang ibu dari anggota suku *opu* untuk menggantikan *welin* ibu yang meninggal. Dalam relasi seperti ini, *opu* berada dalam situasi dituntut untuk bertanggung jawab kepada *belake*
2. *Belake* juga mendapat posisi yang sentral karena masyarakat yakin bahwa status sebagai *belake* adalah status yang sakral. Kesakralan ini, terungkap dalam atribut yang dilekatkan dengan seorang *belake*, sebagai pukon matan<sup>3</sup> dan alant<sup>4</sup>. *Belake* dalam hal ini dimaknai dan memaknai diri sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Simbol sakral yang melekat dalam diri *belake* menjadi satu pertimbangan *opu*, sebab masyarakat yakin bahwa menyakiti hati *belake* akan mendatangkan malapetaka.
3. Relasi antara *opu* dan *belake* terungkap pula dalam sapaan, *opu* disapa dengan sebutan, 'anak', dan *belake* disapa dengan sebutan 'tuan'. Sebagaimana yang

diungkapkan Blumer bahwa di balik penggunaan bahasa ada kepentingan, ada status yang dipertegas, ada kualitas yang ditonjolkan. Sapaan ini mengungkapkan bahwa pertemuan antara *opu* dan *belake* adalah pertemuan antara anak dan tuan, dan seluruh tahap dalam pembicaraan *welin* diwarnai oleh corak relasi ini.

4. Pada ranah komunikasi, substansi pertemuan antara *opu* dan *belake* tidak dikemas dalam bentuk diskusi, melainkan lebih pada komunikasi antara anak dan tuan. Sehingga *opu* sangat teliti memilih diksi saat berbicara dengan *belake* agar ucapannya tidak menyinggung perasaan *belake*.

Semua keputusan tentang *welin* terjadi di rumah *belake* saat pertemuan dengan *opu*. Keputusan ini mesti dijalankan *opu*. Keputusan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Waibalun yang datang melayat di rumah *opu*.

Secara umum bisa diungkapkan bahwa pemaknaan tentang status mempengaruhi perilaku, tepat kata Blumer bahwa setiap tindakan terhadap sesuatu selalu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan makna-makna tersebut disempurnakan dalam proses interaksi sosial.

Pemaknaan tentang status sebagai *belake* memberi kesempatan kepada *belake* untuk membuat keputusan dengan suatu kewenangan yang luas. Dan *opu* menjalankan keputusan *belake* tanpa melewati proses diskusi, artinya

<sup>3</sup>Pukon matan: dapat diparalelkan dengan sumber kehidupan

<sup>4</sup> Alant: milik

keputusan *belake* dijalankan *opu* sebagai suatu tanggung jawab.

### **Welin**

*Welin in se* dimengerti sebagai nilai yang melekat dalam diri seorang ibu karena kemampuan ibu memberi turunan (pro kreasi) dan aktus melayani (gelekat) suku *opu*. *Welin* seorang ibu dbicarakan ketika seorang anggota suku meninggal, entah pria, entah wanita. Jika yang meninggal seorang pria maka *welin* yang dibicarakan adalah *welin* ibunya (ibu dari pria itu), namun jika yang meninggal adalah seorang ibu maka masyarakat membahas *welin* ibu yang meninggal. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2014, seluruh pertemuan yang membahas tentang *welin* bermuara pada satu kesimpulan bahwa momentum pembicaraan tentang *welin* dimaknai sebagai kesempatan bagi *belake* untuk menuntut hak kepada *opu* dan kesempatan bagi *opu* untuk menjalankan keputusan *belake*. Mulanya ada pembicaraan berkaitan dengan penyampaian informasi secara formil tentang peristiwa kematian dari pihak *opu* tetapi kemudian seluruh konteks pembicaraan membahas relasi antara hak dan kewajiban. Seluruh momentum ini kemudian dimengerti sebagai wadah yang melegitimasi keputusan *belake*.

### **Keputusan**

Dalam pembicaraan tentang *welin*, *belake* memutuskan agar pihak *opu* memberi gading kepada *belake*. Berdasarkan pola interpretasi yang berlangsung bisa dijelaskan bahwa pola argumentasi *belake* bergerak pada ranah praktis, yakni menggunakan rujukan

pengalaman sebelumnya bahwa sudah ada praktik penggunaan gading ketika pihak *opu* tidak menemukan perempuan pengganti *welin* untuk *belake*. Rujukan demikian menjadi semacam aturan bagi *belake* dalam melakukan keputusan. Dalam membuat keputusan terindikasi beberapa keputusan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan regula adat:

1. Keputusan berkenaan dengan penggunaan gading sebagai tuntutan dari *belake* kepada pihak *opu*. Keputusan ini bertentangan dengan regula adat yang tidak meng-hendaki penggunaan barang materiil dalam pembicaraan tentang *welin*
2. Dalam membuat keputusan *belake* melakukan beberapa negasi terhadap kebiasaan: menyatakan dengan terus terang ukuran gading, me-minta *opu* untuk menentukan ke-tepatan waktu untuk pelunasan gading. Dua hal ini tentu dibangun di atas basis argumentasi praktis, bahwa *belake* perlu menyatakan dengan terus terang ukuran gading dan *belake* perlu mengetahui dengan pasti batas waktu di mana *opu* haru melunasi utang *opu*. Hal yang praktis ini secara tidak langsung menurunkan kualitas bahasa adat yang penuh makna simbolik ke ranah bahasa yang lebih praktis, dengan bahasa yang plastis dan terang benderang--- dalam catatan Paul Budi Kleden, bahasa yang menjadi terang benderang, menjadi jelas seperti Kristal, itu kemudian berimplikasi pada negasi terhadap teologi dan etika. (Kleden 2006). Sedangkan penentuan batas waktu

yang pasti adalah suatu tindakan yang mengemas dengan rapi pemaksaan agar *opu* segera melunasinya. Padahal masyarakat memiliki mekanisme sendiri berkaitan dengan penentuan waktu, bahwa ketika ada kematian salah seorang anggota keluarga, *welin* itu bisa dibahas lagi. Ini etika berelasi.

Dalam membuat keputusan, *belake* tidak hanya membahas nilai ibu yang meninggal tetapi juga membahas kepentingannya, utangnya kepada pihak lain. Artinya, salah satu tuntutan *belake* kepada *opu* didasarkan pada tuntutan orang lain kepada *belake*.

### **Inkonsistensi Keputusan Terhadap Regula Adat**

Relasi antara pemaknaan diri sebagai *belake* dan keputusan yang dibuat dalam konteks pembahasan tentang *welin* dijelaskan dalam konsep Blumer tentang makna. Menurut Blumer tendensi utama dalam menjelaskan fenomena sosial adalah menjelaskan kerangka interpretasinya. Kerangka interpretasi memetakan pemaknaan aktor yang kemudian terungkap keluar melalui tindakan. Sehingga pertanyaan yang tepat untuk menjelaskan inkonsistensi dalam keputusan ini adalah bagaimana proses interpretasi berlangsung sehingga terjadi inkonsistensi keputusan terhadap regula adat?

Aktor yang membuat keputusan adalah *belake*. Berdasarkan asumsinya tentang makna, Blumer menegaskan bahwa 1) manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal itu kepada mereka. 2) Makna berbagai hal itu berasal dari, atau muncul

dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 3) Makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dihadapi (Blumer: 1986).

Gagasan tentang makna turut menjelaskan keputusan *belake* dalam pembicaraan tentang *welin*. Keputusan *belake* yang sifatnya inkonsistensi bergerak dari pemaknaan *belake* tentang dua hal, pertama status dan kedua momentum pembicaraan tentang *welin*.

Perihal status, *belake* memaknai statusnya sebagai aktor yang memiliki posisi sentral dengan wewenang yang luas. *Belake* memiliki kekuasaan untuk menentukan keputusan. Pemaknaan tentang status diperoleh melalui proses interaksi yang terjadi di masyarakat. Dalam interaksi sosial tampak cara pikir, cara bertutur, dan cara bertindak masyarakat Waibalun terhadap *belake*. Hal ini akan tampak jelas ketika masyarakat terlibat dalam urusan adat yang melibatkan *opu* dan *belake*. Secara prosedural dan substansial, dalam rangkaian kegiatan adat yang melibatkan *opu* dan *belake*, masyarakat tempatkan *belake* sebagai pihak yang merencanakan dan menentukan arah seluruh kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, salah satu alasan yang cukup penting yang mempengaruhi keputusan *belake* adalah keputusan-keputusan sebelumnya dalam forum adat lain dalam konteks masyarakat Waibalun. Ketika ada keputusan sebelumnya yang sifatnya berbeda dengan regula adat, hal ini kemudian digunakan sebagai rujukan untuk membuat keputusan di forum adat yang baru. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa

informasi-informasi tentang keputusan sebelumnya membentuk sistem pengetahuan *belake* yang kemudian *belake* gunakan untuk membuat keputusan. Alhasil, keputusan *belake* akan memberi corak yang sama dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang sudah menyimpang dari regula adat.

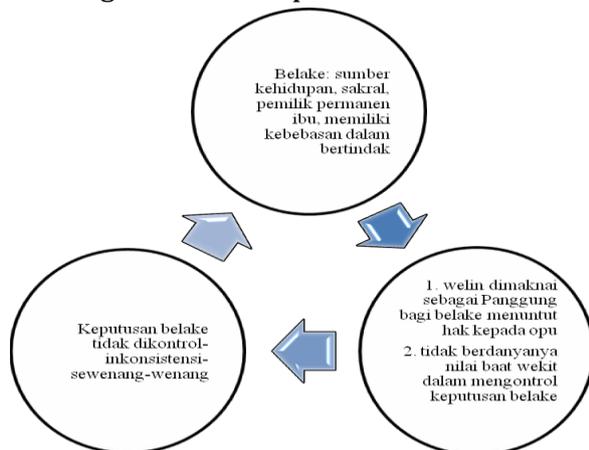
Dalam kerangka berpikir Blumer, pemaknaan itu senantiasa disempurnakan melalui interpretasi para aktor. Interpretasi bisa diterjemahkan sebagai usaha untuk membentur-benturkan konsep dengan realitas yang ada di masyarakat. Usaha ini melewati proses identifikasi diri, saat di mana aktor menggunakan kemampuan kognitif untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ketika keputusan dibuat. Ada tiga hal dominan yang menjadi pertimbangan *belake*, yakni 1) pemaknaan tentang momentum pembicaraan welin sebagai kesempatan untuk menuntut hak dan menjalankan kewajiban, 2) Tuntutan *belake* kepada *opu* tidak hanya menjadi tanggungan satu orang tetapi seluruh anggota keluarga, 3) Pihak *opu* mampu membayar utang kepada *belake*, terlebih ketika pihak *opu* memiliki anak-anak perempuan dalam jumlah banyak. Tentu saja ketika terjadi pernikahan, anggota keluarga *opu* mendapat gading dari pihak laki-laki, sehingga gading yang sama bisa dilunaskan kepada *belake*. Cara berpikir ini, menjadi bagian dari proses interpretasi *belake*.

Cara berpikir ini, berikutnya melahirkan dua implikasi dalam praktik, yakni: 1) pembenaran tindakan, 2) instrumentalisasi momentum pembicaraan tentang Welin. Berkenaan dengan pembenaran tindakan, *belake* berargumentasi bahwa

keputusannya senantiasa merujuk pada praktik yang terjadi sebelumnya. *Belake* memanfaatkan momentum pembicaraan tentang welin sebagai kesempatan untuk menuntut kepada *opu*. Dalam kesempatan ini *belake* berwenang membuat keputusan dan segala keputusan *belake* dalam pembicaraan tentang welin harus dijalankan *opu*. Dengan memanfaatkan momentum ini, *belake* mendapat legitimasi secara sosial karena keputusan melewati satu forum adat.

Secara ringkas kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Waibalun tidak mampu mengontrol keputusan-keputusan *belake*. Hal ini dapat terjadi karena sistem nilai yang berlaku di Waibalun tidak cukup kuat memberi inspirasi dan menjadi rujukan *belake* dalam membuat keputusan. *Belake* menggunakan keputusan-keputusan terdahulu yang melegalkan keputusannya saat ini dan bukan pada nilai yang mampu mengontrol dan mengarahkan keputusannya. Di Waibalun masyarakat mengusung nilai *baat wekit*, yang bisa diterjemahkan dengan sikap saling menghargai. Nilai ini mengajarkan agar masing-masing pihak, *opu* dan *belake* saling menghargai sebagai saudara. Dengan merujuk pada nilai ini, seluruh konteks pembicaraan tentang welin, termasuk pola relasi antara *opu* dan *belake* idealnya dibangun di atas kesadaran saling menghargai bukan karena suatu ketakutan atau karena ketaatan pada aturan tertentu. Selain itu, keputusan *belake* pun seharusnya tidak melahirkan keputusan berupa penggunaan barang materiil, meskipun keputusan-keputusan yang dilakukan pihak lain terjadi seperti itu. Kondisi budaya di mana nilai tidak memiliki daya untuk men-

gontrol situasi sosial disebut Ignas Kleden sebagai entropi kebudayaan (Kleden, 1987). Nilai bukannya hilang atau tidak ada, tetapi nilai tidak memiliki daya dorong yang memberi inspirasi dalam bertindak. Secara umum pola yang melahirkan inkonsistensi dalam keputusan bisa digambarkan seperti berikut:



Gambar tersebut menunjukkan relasi antara pemaknaan *belake* tentang statusnya, tentang momentum pembicaraan tentang *welin* yang telah digunakan sekedar sebagai panggung karena nilai yang mendorong dan memotivasi keputusan *belake* tidak mati tetapi tidak berdaya, sehingga *belake* bertindak sewenang-wenang.

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi keputusan terhadap regula adat terjadi karena adanya relasi antara keluasan wewenang *belake* dalam membuat keputusan, legitimasi atas sarana yang digunakan untuk menyalurkan keputusan, dan tidak berdayanya nilai yang mengontrol para pengambil keputusan. *Welin* tidak kehilangan maknanya tetapi pemaknaan tentang *welin* terkadang dijadikan alasan bagi *belake* untuk

ber-tindak sewenang-wenang terhadap *opu*, dan dalam situasi ketika nilai tidak kuat mengontrol sistem sosial, setiap keputusan yang sifatnya inkonsistensi terhadap aturan bersama kemudian menjadi regula baru untuk keputusan baru. Artinya akan terjadi rantai inkonsistensi dalam keputusan.

## Daftar Pustaka

- Blumer, Herbert (1986), *Symbolic Interactionism Perspective And Method*. University of California: California Press Berkeley and Los Angeles
- Da silva, Carreira (2007), "Re-examining Mead : G.H. Mead on the `Material Reproduction of Society`". *Journal of Classical Sociology*.
- Denzin, Norman K (2003), *Symbolic Interactionism And Cultural Studies: The Politics of Interpretation*. USA: Black Well Publishing.
- Kleden, Ignas (1987), *Sikap Ilmiah Dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta. LP3ES.
- Kleden, Paulus Budi (2006), *Membongkar Derita: Teodice: Sebuah Kegelisahan Filsafat dan Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kohl, Karl-Heinz (2009), *Raran Tonu Wujo: Aspek-Aspek Inti Sebuah Budaya Lokal di Flores Timur* (diterjemahkandaribukuasli: *Der Tod der Reisjungfrau, Mythen, Kulte und Alianzen in einer ostindonesischen lokalkultur*). Maumere: Penerbit Ledalero.

Ritzer, George (2011), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tukan Bernard & Tukan Johan S (1995), *Keluarga Lamaholot: Opu Lake-Opu bine*. Larantuka: Komisi Pastoral Keluarga Keuskupan Larantuka